



Website: <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk>



Terakreditasi S4 – SK No. 36/E/KPT/2019

Penerbit: Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi



## ANALISIS KETERKAITAN WILAYAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERDASARKAN SEKTOR UNGGULAN

Baiq Harly Widayanti<sup>1,2\*</sup>, Duwi Yunitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jember, Indonesia

\*Email Koresponden: [baiqharlywidayanti@gmail.com](mailto:baiqharlywidayanti@gmail.com)

Diterima: 28-08-2023, Revisi: 15-11-2023, Disetujui: 11-12-2023

©2023 Program Studi Pendidikan Geografi, FISE, Universitas Hamzanwadi

**Abstrak:** Otonomi daerah dapat dijadikan sebagai motivasi daerah dalam pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dan keterkaitan antar daerah sangat dibutuhkan untuk saling mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing wilayah. Tujuan penelitian adalah mengetahui keterkaitan antar wilayah di Provinsi NTB berdasarkan sektor unggulan serta mengetahui sektor dominan PDRB di Provinsi NTB. Metode yang digunakan analisis gravitasi yang didukung oleh analisis LQ. Hasil dari penelitian ini keterkaitan wilayah kuat antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat dengan nilai 972.868.646 serta keterkaitan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram dengan nilai 767.209.793. Wilayah dengan keterkaitan sedang adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Mataram dengan nilai keterkaitan 622.083.743 dan Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur dengan nilai keterkaitan 594.809.453. Keterkaitan antar wilayah lainnya di Provinsi NTB termasuk keterkaitan kategori lemah. Sektor dominan PDRB di Provinsi NTB yaitu: 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu Bima dan Lombok Utara. 2) Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis hanya di Sumbawa Barat, dan 3) Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor basis pada Kabupaten Lombok timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima.

**Kata kunci:** keterkaitan, LQ, otonomi, PDRB

**Abstract:** Regional autonomy can be used as a regional motivation in developing local potential to increase economic growth and community welfare. Cooperation and linkages between regions are needed to mutually support the progress of economic growth in each region. The aim of the research is to determine the relationship between regions in NTB Province based on leading sectors and to know the dominant sector of GRDP in NTB Province. The method used gravity analysis is supported by LQ analysis. The results of this study are strong regional linkages between Central Lombok Regency and West Lombok Regency with a value of 972,868,646 and linkages between West Lombok Regency and Mataram City with a value of 767,209,793. Areas with medium linkage are Central Lombok Regency with Mataram City with a linkage value of 622,083,743 and Central Lombok Regency with East Lombok Regency with a linkage value of 594,809,453. Linkages between other regions in NTB Province, including weak category linkages. The dominant sectors of GRDP in NTB Province are: 1) Agriculture, forestry and fisheries are the base sectors in Central Lombok, East Lombok, Sumbawa, Dompu Bima and North Lombok Districts. 2) The mining and quarrying region became the base sector only in West Sumbawa, and 3) The large trade and retail sector became the base sector in East Lombok District, Sumbawa, Dompu, Bima, North Lombok, Mataram City and Bima City.

**Keywords:** linkage, LQ, autonomy, GRDP

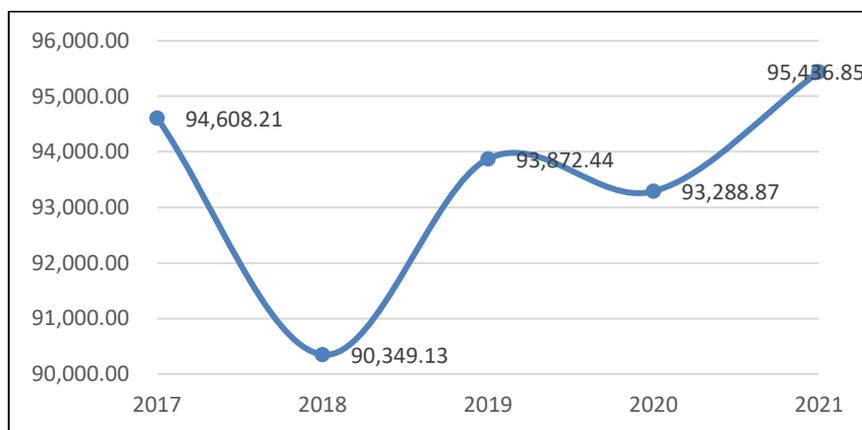
### PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-undang mengenai otonomi daerah menyebabkan menurunnya peran provinsi ataupun negara dalam mengatur suatu daerah sehingga mempengaruhi pola hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Saputra et al., 2015). Kebijakan otonomi daerah ini memberikan kesempatan seluas-luasnya pada daerah di dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri sehingga kerjasama dan kolaborasi antar daerah sangat dibutuhkan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan potensi ekonomi yang dimiliki serta

kemampuan daerah di dalam mengembangkan potensi tersebut secara layak sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan masyarakat pada daerah tersebut (Ciptawaty, 2019). Otonomi daerah dapat memotivasi daerah dalam mengembangkan potensi lokal dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aguswin & Akrom, 2020).

Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) PDRB Provinsi NTB beberapa tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif. Kondisi PDRB pada tahun 2018 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi, dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Namun saat ini kondisi PDRB Provinsi NTB mengalami peningkatan pasca pandemic Covid-19 menjadi 95.436,85 miliar dengan sumbangan terbesar dari Kabupaten Sumbawa Barat 16,87%, Lombok Timur 14,95% dan Kota Mataram 13,98%. Berdasarkan data terakhir kondisi PDRB berdasarkan harga konstan di Provinsi NTB dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Untuk kondisi kemiskinan di Provinsi NTB yang paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara sebesar 27,04% masyarakatnya termasuk dalam kategori miskin, Kabupaten Lombok Timur 15,38% dan Kabupaten Bima 14,88% masyarakatnya masuk dalam kategori miskin. Kondisi yang menarik di Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur memberikan sumbangan PDRB masuk dalam 3 (tiga) terbesar, namun tingkat kemiskinan di wilayah tersebut juga termasuk dalam 3 (tiga) terbesar di Provinsi NTB.



**Gambar 1.** Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB (miliar)  
(Sumber: BPS NTB, 2022)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS NTB, pada tahun 2021 jenis lapangan pekerjaan yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi NTB yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,80%, pertambangan dan penggalian sebesar 17,33% dan perdagangan besar dan eceran sebesar 13,98%. Memperhatikan dari kontribusi sektor lapangan usaha terbesar di Provinsi NTB yang masih pada sektor primer sesuai dengan kondisi Provinsi NTB saat ini dimana sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah banyak pada sektor-sektor primer. Secara umum penggunaan lahan di Provinsi NTB masih didominasi oleh kawasan pertanian seluas 277.113,34 ha, perairan laut 2.915.904 ha dan kawasan hutan 1.071.720 ha.

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah perlu dikaji pusat-pusat pertumbuhannya serta kawasan pendukungnya sehingga dapat diperoleh keterkaitan antarwilayah untuk memudahkan di dalam penyusunan strategi pengembangan. Strategi pembangunan kawasan harus terintegrasi antara berbagai pihak dan berbagai sektor (Moerwanti & Junoasmono, 2017). Perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menjadi keunikan tersendiri bagi setiap daerah sehingga kolaborasi antara wilayah yang berdekatan ataupun yang saling terkait sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (Baiquni, 2012). Otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Badrudin & Siregar, 2015).

Penelitian terkait dengan keterkaitan antar wilayah pernah dilakukan pada Kabupaten Cilacap dengan menggunakan metode analisis asal tujuan perjalanan sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa keterkaitan antar wilayah untuk perjalanan barang saling kebergantungan dalam komoditas yang ditunjang dengan ketersediaan prasarana jaringan jalan. Keterkaitan wilayah dari dan menuju Kabupaten Cilacap

terutama pada wilayah yang memiliki Pelabuhan laut dan bandar udara cukup tinggi terutama terkait dengan pekerjaan antar kedua wilayah dan hubungan yang terjadi adalah salah saling menguntungkan (Kasikoen, 2011). Penelitian keterkaitan arus perdagangan antara negara India dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) pernah dilakukan dengan menggunakan analisis model gravitasi ekspor, model gravitasi impor dan model gravitasi gabungan ekspor dan impor. Selain itu analisis dilengkapi dengan uji huasman, panel *OLS estimation* yang hasilnya keterkaitan erat arus perdagangan dipengaruhi oleh nilai tukar, inflasi dan rasio impor (Mishra et al., 2015). Kebaharuan penelitian ini terletak pada lokasi kajian di Provinsi NTB, fokus penelitian melihat keterkaitan antar wilayah dengan memperhatikan sektor-sektor di PDRB yang saling mempengaruhi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sehingga dengan dasar tersebut perlu dilakukan kajian keterkaitan antar wilayah di Provinsi NTB dengan harapan semua wilayah dapat berkembang dan maju secara bersama-sama sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini antara lain: 1) Mengetahui keterkaitan antar wilayah di Provinsi NTB berdasarkan sektor unggulan, dan 2) Mengetahui sektor dominan PDRB di Provinsi NTB.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik sehingga didapatkan besarnya keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Provinsi NTB. Data menggunakan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan melalui data yang terpublikasi secara *online*. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel jumlah penduduk dan jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain. Namun dalam pembahasan akan diperjelas sektor unggulan pada masing-masing kawasan yang dapat menjadi daya tarik ataupun daya dorong dalam hubungan keterkaitan antar wilayah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah kabupaten / kota yang berada di dalam lingkup wilayah Provinsi NTB. Jumlah lokasi penelitian sebanyak 8 kabupaten dan 2 kota di wilayah Provinsi NTB. Adapun Kota / Kabupaten yang akan menjadi lokasi penelitian yaitu: Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima.

Teknik analisis menggunakan analisis gravitasi dengan konsep bahwa dua buah benda memiliki massa tertentu sehingga memiliki gaya tarik menarik antara keduanya. Kekuatan gaya tarik menarik ini berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Kekuatan interaksi antara dua wilayah yang diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara wilayah dengan menggunakan formulasi sebagai berikut (Aguswin & Akrom, 2020; Mishra et al., 2015).

$$I_{AB} = \frac{k \cdot P_A \cdot P_B}{(d_{AB})^2}$$

Keterangan:

- $I_{AB}$  = Kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B
- $K$  = angka konstanta empiris nilainya 1
- $P_A$  = jumlah penduduk wilayah A
- $P_B$  = jumlah penduduk wilayah B
- $d_{AB}$  = jarak wilayah A dan B

Klasifikasi interaksi antar lokasi dilakukan dengan menentukan tingkatan klasifikasi yang terdiri dari interaksi klasifikasi tinggi, rendah dan sedang. Diukur dengan formulasi interval antar kelas sebagai berikut (Papur et al., 2022).

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai kelas tertinggi} - \text{Nilai kelas terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

Nilai klasifikasi tingkat interaksi didasarkan pada klasifikasi keterkaitan tinggi, rendah sedang. Sehingga setelah mendapat nilai interval kelas maka akan dinilai klasifikasi untuk masing-masing tingkat keterkaitan berdasarkan hasil hitungan tingkat keterkaitan. Selain itu untuk mendukung analisis juga

digunakan analisis *Location Quotient (LQ)*. Analisis LQ digunakan untuk melihat sektor unggulan dan non unggulan serta sebaran lokasi sektor unggulan (Heldayani et al., 2022). Analisis LQ digunakan untuk untuk mengetahui sektor basis dan non basis dari sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah dengan menggunakan formulasi sebagai berikut (Umasugi & Amin, 2019; Wahyuningsih et al., 2022).

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Keterangan:

- $v_i$  = Nilai produksi subsector i pada kabupaten
- $v_t$  = Total PDRB kabupaten
- $V_i$  = Nilai produksi subsector i pada provinsi
- $V_t$  = Total PDRB provinsi

Apabila nilai  $LQ > 1$  maka sektor PDRB di Kota / Kabupaten lebih besar dibandingkan dengan nilai pada provinsi NTB sehingga termasuk di dalam sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan jika nilai  $LQ < 1$  berarti spesialisasi sektor PDRB di Kota / Kabupaten lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi NTB dan termasuk bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Untuk nilai  $LQ = 1$  memiliki arti bahwa Tingkat spesialisasi sektor PDRB di Kota / Kabupaten sama dengan nilai di Provinsi NTB yang artinya sektor tersebut hanya mampu dikonsumsi pada daerah tersebut (Tumangkeng, 2018).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi NTB terdiri dari 2 (dua) pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan jumlah wilayah administrasi sebanyak 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Kabupaten / Kota yang berada di Pulau Lombok antara lain: Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta Kota Mataram. Kabupaten / Kota di Pulau Sumbawa, yaitu: Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima. Luas wilayah Provinsi NTB 18.572,32 km<sup>2</sup> dengan wilayah terluas yaitu Kabupaten Sumbawa 6.643,98 km<sup>2</sup> dan wilayah dengan luas paling kecil yaitu Kota Mataram 61,30 km<sup>2</sup>.

Pusat pemerintah Provinsi NTB berada di Kota Mataram. Berdasarkan administrasi jarak terjauh dari pusat pemerintahan provinsi adalah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang berada di Pulau Sumbawa. Sedangkan wilayah yang memiliki jarak terdekat dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.

**Tabel 1.** Jarak dari Ibukota Kabupaten / Kota Ke Ibukota Provinsi

Wilayah	Jarak ke Ibukota Provinsi (Km)
Lombok Barat	20,3
Lombok Tengah	27,0
Lombok Timur	52,0
Sumbawa	179,0
Dompu	377,0
Bima	414,0
Sumbawa Barat	111,7
Lombok Utara	50,5
Kota Mataram	1,0
Kota Bima	439,0

Sumber: Kabupaten se Provinsi NTB, 2023

Wilayah dengan luas terbesar adalah Kabupaten Sumbawa, namun jumlah penduduknya bukan yang paling tinggi diantara kota/kabupaten lainnya. Sedangkan Kota Mataram dengan luas wilayah terkecil jumlah penduduknya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Bima, Kabupaten Lombok Utara, Sumbawa Barat dan Dompu. Jumlah penduduk di Kota Mataram cukup tinggi disebabkan karena banyaknya daya tarik kota ataupun lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mampu menarik

perpindahan masyarakat ke Kota Mataram. Berikut merupakan data sebaran jumlah penduduk di Provinsi NTB.

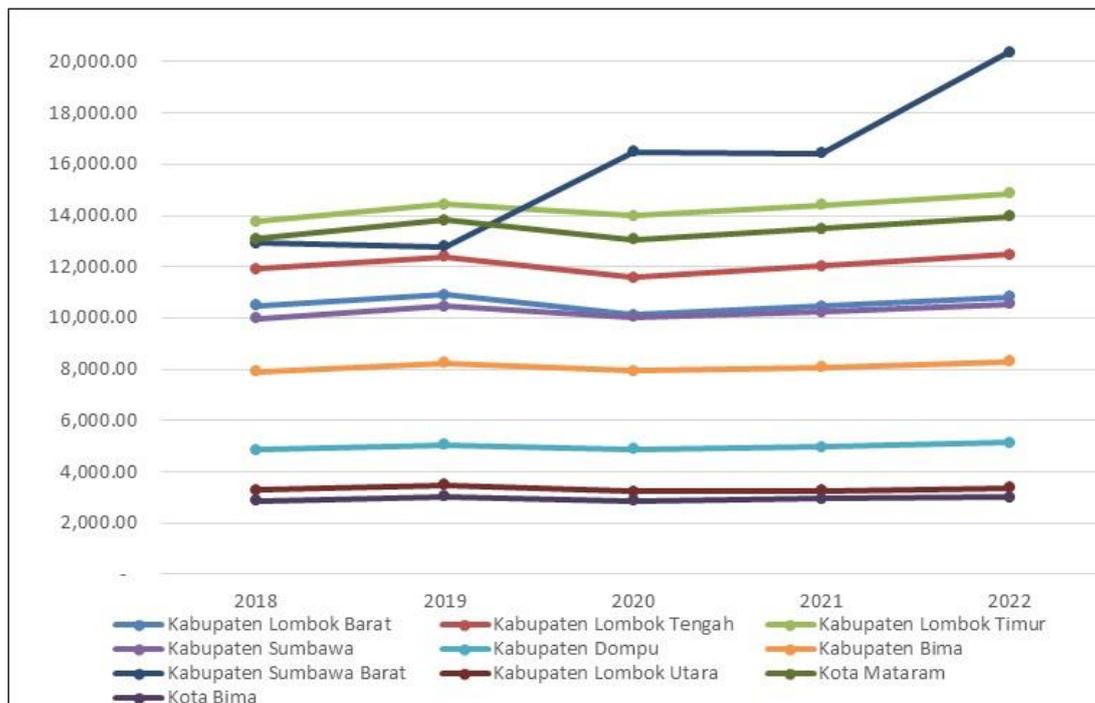
**Tabel 2.** Jumlah Penduduk per Kabupaten / Kota di Provinsi NTB Tahun 2022

Wilayah	Penduduk (Ribu Jiwa)
Kabupaten Lombok Barat	731.810
Kabupaten Lombok Tengah	1.049.708
Kabupaten Lombok Timur	1.343.901
Kabupaten Sumbawa	517.777
Kabupaten Dompu	238.201
Kabupaten Bima	520.444
Kabupaten Sumbawa Barat	148.458
Kabupaten Lombok Utara	251.451
Kota Mataram	432.024
Kota Bima	156.224
<b>Jumlah</b>	<b>5.389.998</b>

Sumber: Kabupaten se-Provinsi NTB, 2023

### Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi NTB secara umum pada masing-masing kabupaten / kota mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 seluruh kabupaten / kota mengalami penurunan nilai PDRB yang disebabkan karena pandemi Covid-19. Menariknya Kabupaten Sumbawa Barat meskipun pandemi covid tidak berdampak terhadap PDRB-nya, hal ini disebabkan karena potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat adalah pertambangan. Nilai PDRB tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 20.379,44 miliar pada tahun 2022 yang yang paling sedikit nilai PDRB nya adalah Kota Bima yang hanya mencapai 3.018,40 miliar pada tahun 2022. Kota Mataram meskipun memiliki luas wilayah yang paling sedikit namun nilai PDRBnya termasuk di dalam 3 terbesar di Provinsi NTB dimana mencapai angka 13.951,85 miliar di tahun 2022.



**Gambar 2.** Perkembangan PDRB se Kabupaten / Kota di Provinsi NTB  
(Sumber: Analisis Data Penelitian, 2023)

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah dipengaruhi pula oleh potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang terdapat pada masing-masing wilayah (Djadjuli, 2018). Sedangkan dalam penelitian lainnya ditemukan faktor pertumbuhan ekonomi berupa investasi, angkatan kerja yang bekerja (Pambudi & Miyasto, 2013). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru yang hasilnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh PMDN, ekspor, tenaga kerja dan infrastruktur jalan (Hidayat et al., 2011). Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melihat pertumbuhan ekonomi adalah kontribusi PDRB (Hirsan et al., 2019; Kurniawan & Managi, 2018).

**Tabel 3** Kontribusi PDRB 3 (tiga) Dominan Terbesar di Kabupaten / Kota Provinsi NTB Tahun 2022

Wilayah	Lapangan Usaha Dominan	Kontribusi (%)
Lombok Barat	Pertanian, kehutanan dan perikanan	21,20
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	13,67
	Konstruksi	11,23
Lombok Tengah	Pertanian, kehutanan dan perikanan	26,18
	Konstruksi	17,67
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	11,95
Lombok Timur	Pertanian, kehutanan dan perikanan	27,44
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	16,88
	Konstruksi	11,17
Sumbawa	Pertanian, kehutanan dan perikanan	39,54
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	16,10
	Konstruksi	12,72
Dompu	Pertanian, kehutanan dan perikanan	39,43
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	15,98
	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	9,26
Bima	Pertanian, kehutanan dan perikanan	44,98
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	16,40
	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	7,25
Sumbawa Barat	Pertambangan dan penggalian	81,90
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,65
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	3,73
Lombok Utara	Pertanian, kehutanan dan perikanan	36,51
	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	14,38
	Konstruksi	9,79
Kota Mataram	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	20,19
	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,61
	Konstruksi	9,23
Kota Bima	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda	24,60
	Pertanian, kehutanan dan perikanan	13,74
	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	11,86

Sumber: Kabupaten Dalam Angka se-Provinsi NTB, 2022

### Potensi Wilayah

Potensi wilayah atau daya tarik suatu kawasan erat kaitannya dengan keberadaan sarana prasarana yang ada pada wilayah tersebut (Artmann et al., 2019). Potensi yang berada pada masing-masing wilayah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah penyumbang angka PDRB pada masing-masing wilayah (Bustani et al., 2022). Fasilitas atau sarana dengan cakupan pelayanan yang bersifat nasional maupun internasional mampu menarik banyak pengunjung luar negeri (Lim et al., 2019) ataupun masyarakat di wilayah sekitar untuk datang berkunjung. Beberapa fasilitas dengan cakupan pelayanan nasional maupun internasional di wilayah Provinsi NTB dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4.** Fasilitas Skala Pelayanan Nasional dan Internasional

Wilayah	Jenis Sarana / Fasilitas	Skala Pelayanan
Lombok Barat	Pelabuhan Penyeberangan Lembar	Nasional
	6 perguruan tinggi	Nasional
Lombok Tengah	Bandara Internasional Lombok	Internasional
	11 perguruan tinggi	Nasional
Lombok Timur	Pelabuhan Penyeberangan Kayangan	Nasional
	1 unit RS tipe B	Nasional
	17 perguruan tinggi	Nasional
Sumbawa	9 perguruan tinggi	Nasional
	Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin	Nasional
Dompu	4 perguruan tinggi	Nasional
Bima	Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin	Nasional
	6 perguruan tinggi	Nasional
Sumbawa Barat	Pelabuhan Penyeberangan Pototano	Nasional
	Tambang Emas	Internasional
	1 perguruan tinggi	Nasional
Lombok Utara	2 perguruan tinggi	Nasional
Kota Mataram	Pusat Pemerintahan Provinsi NTB	Nasional
	3 unit RS Tipe B	Nasional
	41 PT negeri dan swasta	Nasional & Internasional
	Bandara Udara Selaparang	Nasional
Kota Bima	13 perguruan tinggi	Nasional

Sumber: Kabupaten Dalam Angka se-Provinsi NTB, 2022

### Analisis Keterkaitan

Analisis keterkaitan antar wilayah di Provinsi NTB diukur dengan menggunakan teknik analisis gravitasi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan jarak antar wilayah. Adapun hasil analisis gravitasi wilayah di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.** Analisis Gravitasi Keterkaitan Antar Wilayah di Provinsi NTB Tahun 2022

Wilayah	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
Lombok Barat	-	972,868,646	177,672,309	7,828,810	1,247,565	1,728,567	2,898,620	44,925,380	767,209,793	564,073
Lombok Tengah	972,868,646	-	594,809,453	13,320,132	2,063,498	2,775,004	5,534,625	39,933,813	622,083,743	910,041
Lombok Timur	177,672,309	594,809,453	-	23,249,725	3,394,308	4,270,462	12,408,874	42,092,491	214,718,005	1,428,272
Sumbawa	7,828,810	13,320,132	23,249,725	-	7,646,785	3,054,948	1,811,390	1,955,945	6,981,433	1,046,649
Dompu	1,247,565	2,063,498	3,394,308	1,598,166	-	10,434,331	414,745	365,163	724,050	4,302,545
Bima	1,728,567	2,775,004	4,270,462	3,054,948	10,434,331	-	461,882	487,717	1,311,841	31,259,455
Sumbawa Barat	2,898,620	5,534,625	12,408,874	1,811,390	414,745	461,882	-	1,371,163	5,140,497	162,318
Lombok Utara	44,925,380	39,933,813	42,092,491	1,955,945	365,163	487,717	1,371,163	-	42,596,948	188,091
Kota Mataram	767,209,793	622,083,743	214,718,005	6,981,433	724,050	1,311,841	4,645,535	42,596,948	-	350,208
Kota Bima	564,073	910,041	1,428,272	1,046,649	4,302,545	31,259,455	162,318	188,091	350,208	-

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

Berdasarkan hitungan pada tabel di atas maka nilai interval kelas dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Nilai kelas tertinggi} - \text{Nilai kelas terendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{972.868.646 - 162.318}{3}$$

Nilai Inteval Kelas = 324.235.443 sehingga nilai interaksi atau keterkaitan antar daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Papur et al., 2022).

- Klasifikasi Interaksi kuat yang memiliki nilai < 324.397.761
- Klasifikasi Interaksi sedang yang memiliki nilai 324.397.762 – 648.633.203
- Klasifikasi Interaksi lemah yang memiliki nilai > 648.633.204

Berdasarkan hasil hitungan di atas wilayah yang memiliki keterkaitan atau interaksi yang kuat adalah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat. Wilayah yang memiliki keterkaitan atau interaksi sedang adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan wilayah selain itu antar wilayahnya memiliki keterkaitan atau interaksi yang lemah.

Beberapa hal yang menjadi daya tarik pada masing-masing wilayah sehingga keterkaitan antar wilayahnya menjadi kuat. Seperti hubungan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram, dimana banyak warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang bekerja maupun bersekolah di Kota Mataram. Kabupaten Lombok Barat menjadi kawasan hinterland dari Kota Mataram dimana masyarakat yang bekerja di Kota Mataram lebih memilih tempat tinggal di pinggiran kota. Keterkaitan antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat paling kuat diantara wilayah lainnya. Perkembangan Kabupaten Lombok Tengah saat ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap Kabupaten Lombok Barat salah satunya Kabupaten Lombok Tengah sebagai penyedia lapangan pekerjaan dengan berdirinya sirkuit Mandalika beserta bandara Internasional Lombok. Pengembangan di Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya berkaitan erat dengan perkembangan di Kabupaten Lombok Barat namun juga berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur ataupun Kota Mataram.

Keterkaitan ini juga erat kaitannya dengan sektor basis yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Provinsi NTB, dimana sektor-sektor basis yang ada pada masing-masing wilayah akan memenuhi kebutuhan sektor yang non basis pada wilayah lainnya. Adapun hasil analisis LQ untuk mengetahui sektor basis berdasarkan PDRB untuk masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.** Analisis LQ PDRB Wilayah di Provinsi NTB Tahun 2022

Lapangan Usaha	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.96	1.15	1.20	1.73	1.75	1.97	0.20	1.60	0.17	0.60
Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.30	0.41	0.17	0.17	0.17	4.80	0.23	0.00	0.02
Industri Pengolahan	1.09	1.18	1.74	0.46	0.54	0.51	0.07	0.33	2.19	0.75
Pengadaan Listrik dan Gas	1.30	0.92	1.06	1.19	0.56	0.67	0.31	1.60	1.38	2.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.52	1.36	0.91	0.58	0.29	0.61	0.15	1.53	2.21	0.40
Konstruksi	1.22	1.79	1.13	1.29	0.81	0.62	0.28	0.99	0.94	0.92
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.95	0.85	1.20	1.14	1.11	1.17	0.26	1.02	1.43	1.75
Transportasi dan Pergudangan	2.03	1.73	0.71	0.57	0.82	1.06	0.32	0.82	0.91	1.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.19	0.71	0.71	0.80	0.90	0.23	0.22	2.27	0.90	2.14
Informasi dan Komunikasi	1.09	0.77	0.86	0.62	0.50	0.62	0.15	0.90	3.08	0.80
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.99	0.63	0.70	0.99	0.85	0.96	0.12	0.63	2.98	0.59
Real Estat	1.08	1.23	1.12	0.65	1.02	0.84	0.26	1.27	1.64	1.67
Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.52	0.84	0.63	1.34	1.13	0.52	0.22	1.26	2.56	2.02
Jasa Pendidikan	1.05	0.97	1.15	1.06	1.46	1.13	0.20	1.12	1.29	1.85
Jasa Pendidikan	1.07	0.98	1.09	0.99	1.02	0.74	0.21	1.22	1.78	1.65

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.05	1.27	1.08	0.61	0.73	0.50	0.14	0.89	2.25	1.65
Jasa Lainnya	1.05	1.06	0.99	0.79	0.82	0.63	0.19	1.07	2.16	1.77

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2023

Berdasarkan standar kriteria perhitungan nilai jika  $LQ > 1$  maka sektor PDRB termasuk di dalam sektor basis dan berpotensi untuk ekspor. Beberapa sektor yang termasuk di dalam sektor basis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 7.** Sektor Basis di Provinsi NTB

Lapangan Usaha	Lokasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara
Pertambangan dan Penggalian	Sumbawa Barat
Industri Pengolahan	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram
Pengadaan Listrik dan Gas	Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram
Konstruksi	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa,
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Transportasi dan Pergudangan	Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, Kota Bima
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Bima
Informasi dan Komunikasi	Lombok Barat, Kota Mataram
Jasa Keuangan dan Asuransi	Kota Mataram
Real Estat	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Jasa Perusahaan	Sumbawa, Dompu, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara Kota Mataram, Kota Bima
Jasa Pendidikan	Lombok Barat, Dompu, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Lombok Barat, Lombok Tengah Lombok Timur, Kota Mataram, Kota Bima
Jasa Lainnya	Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, keterkaitan wilayah yang terjadi di Provinsi NTB berdasarkan aspek sektor basis yang dimiliki antara lain: 1) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki ketergantungan dengan wilayah Lombok Tengah. Sumbawa Barat ketergantungan dengan Kabupaten Sumbawa sedangkan Kota Mataram ketergantungan dengan Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara. Kota Bima memiliki ketergantungan dengan Kabupaten Bima; 2) Sektor pertambangan dan penggalian Sumbawa Barat mendukung kebutuhan tambang dan penggalian untuk semua wilayah di Provinsi NTB bahkan sampai dikirim ke luar negeri; 3) Sektor industri pengolahan Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Kota Bima dan Lombok Utara bergantung pada Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur; 4) Sektor listrik dan gas Lombok Tengah bergantung pada Kota Mataram dan Lombok barat. Dompu, Bima dan Sumbawa Barat bergantung pada Sumbawa dan Kota Bima; 5) Sektor pengadaan Air Lombok Timur bergantung Lombok Barat dan Lombok Tengah. Untuk wilayah Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat dan Kota Bima untuk pemenuhannya masih secara mandiri dilakukan oleh wilayah masing-masing; 6) Sektor kontruksi Dompu, Bima, Sumbawa Barat dan Kota Bima bergantung kepada Sumbawa. Lombok Timur bergantung Kota Mataram; 7) Perdagangan Lombok Barat dan Lombok Tengah bergantung pada Kota Mataram.

Sumbawa Barat bergantung pada Sumbawa; 8) Transportasi dan pergudangan Lombok Timur bergantung pada Lombok Tengah. Kota Mataram bergantung kepada Lombok Barat, Lombok Utara masih memenuhi secara mandiri. Dompu bergantung pada Kabupaten Bima dan Kota Bima. Untuk Sumbawa Barat dan Sumbawa masih memenuhi kebutuhan secara mandiri; 9) Penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing wilayah yang non basis masih memenuhi kebutuhan secara pribadi di masing-masing wilayah; 10) Informasi dan komunikasi Kota Mataram dan Lombok Barat mensupport semua wilayah di Provinsi NTB; 11) Jasa keuangan hanya Kota Mataram yang menjadi sektor basis dan hanya bisa mensupport Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Lombok Tengah; 12) Real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan masing-masing wilayah memenuhi kebutuhan sendiri; 13) Jasa Pendidikan dan kesehatan seluruh wilayah di Provinsi NTB bergantung pada Kota Mataram.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas maka keterkaitan antar wilayah di Provinsi NTB berdasarkan sektor unggulan dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu keterkaitan kuat, keterkaitan sedang dan keterkaitan lemah. Wilayah dengan keterkaitan yang kuat yaitu Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat dengan nilai keterkaitan 972.868.646 serta keterkaitan antara Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram dengan nilai keterkaitan 767.209.793. Wilayah dengan keterkaitan sedang adalah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Mataram dengan nilai keterkaitan 622.083.743 dan Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Timur dengan nilai keterkaitan 594.809.453. Keterkaitan antar wilayah lainnya di Provinsi NTB termasuk keterkaitan kategori lemah. Sektor PDRB yang dominan di Provinsi NTB berdasarkan hasil analisis LQ, yaitu: 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor basis di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu Bima dan Lombok Utara. 2) Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis hanya di Sumbawa Barat, 3) Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor basis pada Kabupaten Lombok timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aguswin, A., & Akrom, A. (2020). Gravity Model dalam Place-Making Pola Interaksi Spasial di Pulau Kalimantan (Studi Kasus: Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin). *Jurnal Pelita Teknologi*, 15(2), 117–132.
- Artmann, M., Kohler, M., Meinel, G., Gan, J., & Ioja, I. C. (2019). How smart growth and green infrastructure can mutually support each other — A conceptual framework for compact and green cities. *Ecological Indicators*, 96, 10–22. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.001>
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2015). The evaluation of the implementation of regional autonomy in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/ejem>
- Baiquni, M. (2012). Tinjauan Geografi Regional Terhadap Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). *Forum Geografi*, 26(2), 104–119.
- BPS NTB. (2022). *PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Ribuan Rupiah), 2020-2022*. diakses dari <https://ntb.bps.go.id/indicator/52/358/1/pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat.html>
- Bustani, Khaddafi, M., & Ilham, R. N. (2022). Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income in Aceh Province Period Year 2016-2020. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 2(3), 459–468.
- Ciptawaty, U. (2019). Pola Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 136–143. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.41>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.

- Heldayani, E., Asiyah, S., & Mardianto. (2022). Implementasi Metode Location Quotient (LQ) Untuk Analisis Potensi Komoditas Unggulan Subsektor Hortikultura Di Kabupaten Muara Enim. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 6(2), 220–231. <https://doi.org/10.29408/geodika.v6i2.6496>
- Hidayat, M., Sari, L., & Aqualdo, N. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(4), 48–63.
- Hirsan, F. P., Sushanti, I. R., & Widayanti, B. H. (2019). Kajian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bima. *Jurnal Planoearth*, 4(1), 31–42.
- Kasikoen, K. M. (2011). Keterkaitan Antar Wilayah (Studi Kasus : Kabupaten Cilacap). *Studi Kasus: Kabupaten Cilacap Jurnal Planesa*, 2(2), 146–153.
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment\*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1450962>
- Lim, C., Zhu, L., & Koo, T. T. R. (2019). Urban redevelopment and tourism growth: Relationship between tourism infrastructure and international visitor flows. *International Journal of Tourism Research*, 21(2), 187–196. <https://doi.org/10.1002/jtr.2253>
- Mishra, A. K., Gadhia, J. N., Kubendran, N., & Sahoo, M. (2015). Trade Flows between India and Other BRICS Countries: An Empirical Analysis Using Gravity Model. *Global Business Review*, 16(1), 107–122. <https://doi.org/10.1177/0972150914553523>
- Moerwanti, A. S., & Junoasmono, T. (2017). Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. *Jurnal HPJI*, 3(2), 67–78.
- Pambudi, E. W., & Miyasto, M. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 1–11.
- Papur, A. N., Yusliana, Y., & Hidayati, S. R. (2022). Interaksi Desa Kota Pada Kota-Kota Kecil di Kawasan Pesisir DIY. *Jurnal Matra*, 3(1), 11–20.
- Saputra, Z., Muhammad, S., & Syahnur, S. (2015). Analisis Keterkaitan Regional Kabupaten/Kota Dalam Pembentukan Klaster Pengembangan Ekonomi Wilayah Provinsi Aceh (Pendekatan Analisis Spasial). *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2), 84–93.
- Tumangkeng, S. (2018). Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(1), 127–138.
- Umasugi, L., & Amin, S. (2019). Analisis Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2013-2017. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 152. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.152-156>
- Wahyuningsih, Y. E., Ansari, L. P., Yasrizal, Y., Sani, S. R., Zulham, T., & Saputra, J. (2022). Analyzing the Regional Leading Sectors with Location Quotient and Its Effect on Economic Growth in Aceh Jaya, Indonesia. *Frontiers in Business and Economics*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.56225/finbe.v1i1.83>